

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Adanya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah dapat berekspresi dan berkreasi dalam rangka membangun daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal utama yang menjadi sorotan pada pemerintah daerah yaitu pendapatan dan belanja daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2011:136) menyatakan bahwa penyajian pendapatan pada laporan realisasi anggaran (LRA), analisis rasio keuangan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Derajat desentralisasi
2. Rasio ketergantungan daerah
3. Rasio kemandirian daerah
4. Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah (PAD)
5. Rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah
6. Derajat kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMD)
7. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)
8. Rasio pendapatan terhadap utang

Dalam hal ini peneliti menganalisis rasio keuangan provinsi di Indonesia dengan menggunakan derajat desentralisasi dan rasio kemandirian daerah. Rasio derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tahun 2010 melakukan penelitian di 42 kabupaten/kota, menunjukkan kendala terbesar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah dalam hal desentralisasi fiskal. Dalam praktiknya hampir semua daerah sering kesulitan dalam mencari dan

meningkatkan pendapatannya sendiri, sehingga sebagian besar daerah masih menggantungkan penerimaannya dari bantuan dari pusat baik dalam bentuk dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus.

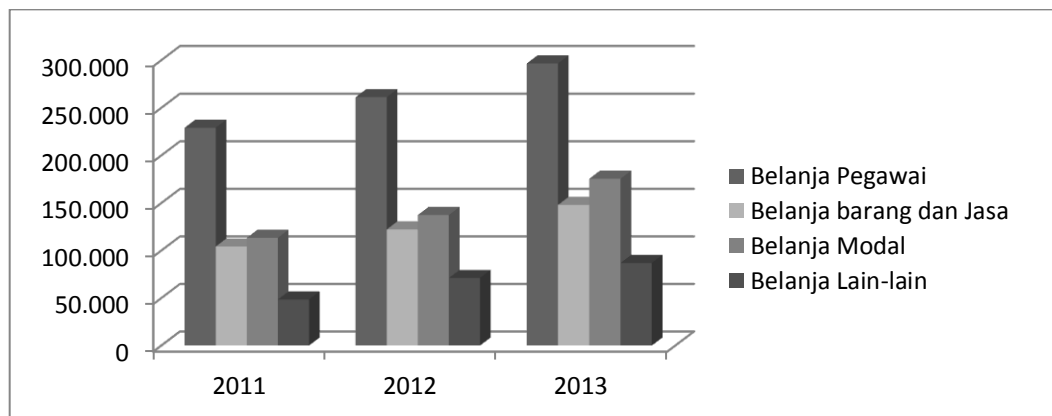
Selain derajat desentralisasi, peneliti juga menggunakan rasio kemandirian daerah dalam menilai pendapatan provinsi yang diukur dari kecilnya ketergantungan daerah terhadap dana dari pusat. Selain itu kemandirian daerah ditunjukkan dengan tingginya pendapatan asli daerah. Semakin tinggi angka rasio ini semakin tinggi kemandirian pemerintah daerah. PAD mengutamakan optimalisasi dan proses, sedangkan dana perimbangan cenderung bersifat transfer. Oleh karena sifatnya adalah transfer, kapasitas fiskal daerah tidak tercermin dari dana perimbangan. PAD sangat mempengaruhi kemandirian daerah untuk memenuhi seluruh kebutuhan belanja, baik itu belanja operasional maupun belanja modal. Di Indonesia ternyata rata-rata penerimaan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dari komponen PAD sangat kecil, hanya sebesar 23,2 persen dari total pendapatan (DJPk Kemkeu, 2014).

Kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan ketergantungan daerah, semakin besar tingkat ketergantungan daerah maka semakin kecil tingkat kemandirian daerah tersebut. Dan saat ini sebagian besar pemerintah daerah masih menggantungkan penerimaan dari dana pemerintah pusat, sehingga hal ini membuat tingkat kemandirian daerah menjadi kecil. Masalah yang terjadi jika besarnya ketergantungan daerah yang tinggi terhadap pusat dalam jangka panjang akan mengakibatkan pemerintah pusat mengalami "*financial distress*" (tekanan berat keuangan) karena kesulitan menanggung beban keuangan daerah. Salah satu penyebab kondisi itu adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD (www.antarajatim.com:2014).

Selain pendapatan, sorotan utama terhadap pemerintah daerah yaitu tentang belanja. Belanja terdiri dari belanja operasional dan belanja modal. Pembangunan daerah dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Agar pelayanan publik maksimal maka pemerintah daerah memerlukan

alokasi belanja modal yang lebih tinggi. Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil tentang belanja modal.

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (2013) mengungkapkan bahwa kecenderungan dari tahun ke tahun, belanja modal daerah sudah memperlihatkan peningkatan. Namun, peningkatan tersebut harus diekselerasi. Upaya ini dianggap lebih memberi dorongan pada sektor ekonomi, selain lebih bermanfaat bagi daerah ketimbang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dihabiskan untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah daerah. Berikut disajikan *trend* belanja daerah pada gambar 1.1



Sumber: djpk.go.id

Gambar 1.1

Trend Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2011-2013

Selain dalam bentuk diagram berikut disajikan *trend* belanja dalam bentuk tabel 1.1

Tabel 1.1

Trend Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2011-2013

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Lain-lain
2011	229.081	104.221	113.438	48.449
2012	261.153	122.225	137.438	71.071
2013	296.540,22	148.011,73	175.578,73	86.952,61

Sumber: djpk.go.id

Cara menambah alokasi belanja modal ialah berhemat pada belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai ditekan dengan tidak merekrut

pegawai baru kecuali guru, dokter, dan perawat. Belanja barang dihemat dengan mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia”**

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada latar belakang di atas yaitu:

1. Apakah derajat desentralisasi berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi di Indonesia?
2. Apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi di Indonesia?
3. Apakah derajat desentralisasi dan kemandirian daerah berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi di Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Objek penelitian ini adalah semua provinsi di Indonesia yang mempublikasikan laporan realisasi anggarannya pada tahun 2012-2014. Selain itu untuk lebih terarahnya penelitian ini maka peneliti memberi batasan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah provinsi sebagai variabel bebas dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi dan kemandirian daerah. Sedangkan variabel terikat yaitu belanja modal daerah. Data laporan realisasi anggaran dalam penelitian ini diperoleh dari laman resmi www.djpk.kemenkeu.go.id

1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh derajat desentralisasi terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemandirian daerah terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi di Indonesia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis derajat desentralisasi, kemandirian daerah berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti sehubungan dengan analisis laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
2. Dapat menjadi masukan bagi para calon investor untuk berkontribusi dalam pemerintah tingkat provinsi di Indonesia.
3. Dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan topik yang sama.
4. Sebagai sarana peneliti dalam menginterpretasikan ilmu yang diperoleh sehubungan dengan analisis laporan keuangan sektor publik.